

BAB IV

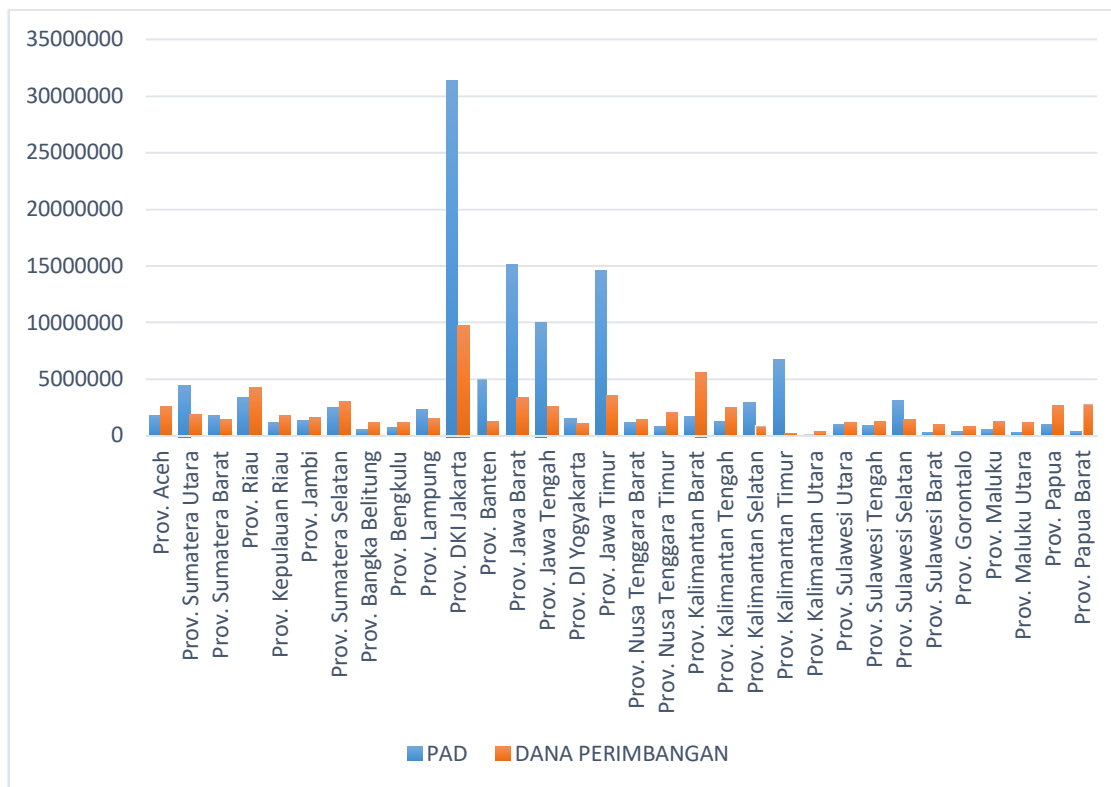
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2016. Sampel yang diambil dari keseluruhan populasi hanyalah Pemerintah Provinsi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah dipublikasikan dan datanya dapat diunduh melalui *website* Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) dan nilai PDRB (rasio pertumbuhan ekonomi) yang diunduh melalui *website* Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id).

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan dalam Bab III, dari total 34 provinsi di Indonesia yang tercatat dalam Kemendagri sampai dengan tahun 2016, diperoleh hasil pemilihan sampel sebanyak 32 Provinsi. Hal ini dikarenakan terdapat 2 Provinsi yang belum mempublikasikan APBD Provinsinya, yaitu Sulawesi Tenggara dan Bali di tahun 2016. Sehingga tidak memenuhi syarat pertama yaitu, provinsi yang mempublikasikan laporan realiasi APBD selama 2014-2016. Hal tersebut menyebabkan peneliti tidak mendapatkan data mengenai PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berhubungan dengan data yang dikumpulkan, dihimpun, serta dinyatakan dalam bentuk angka. Data yang diambil dari laporan realisasi APBD setiap daerah adalah PAD dan dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH). Berikut disajikan komposisi perbandingan PAD dan dana perimbangan pada 32 Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016.

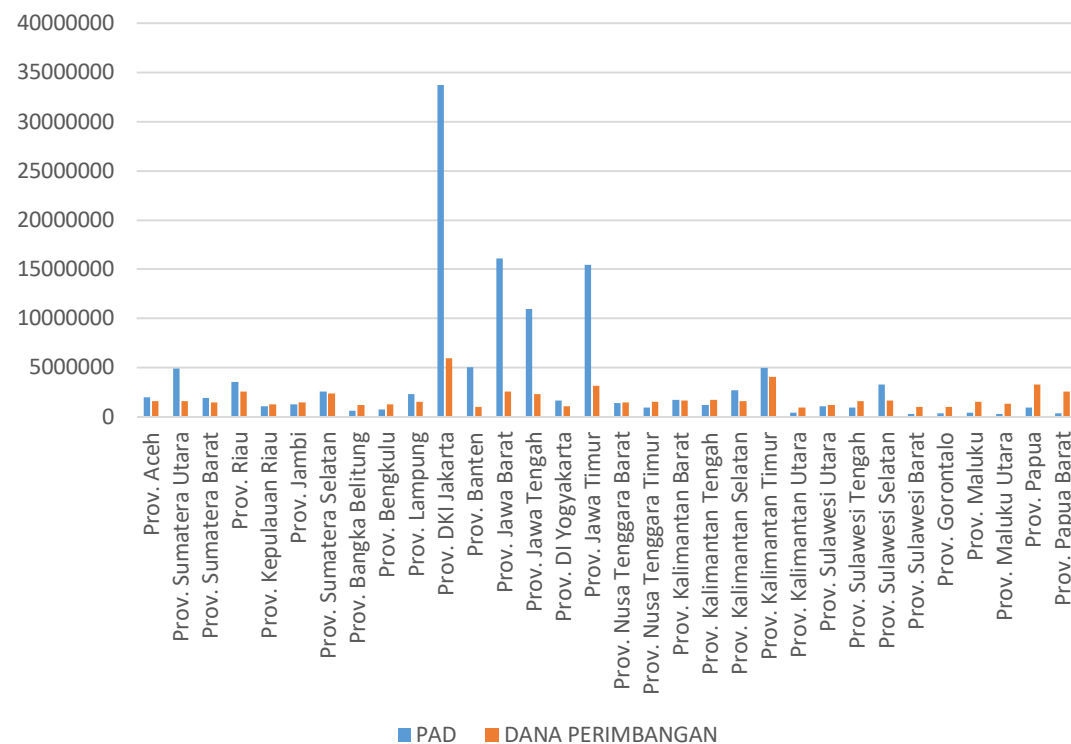


Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2014

Gambar 4.1.
Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia Tahun 2014

Berdasarkan data dari gambar 4.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, komposisi PAD pada beberapa provinsi jauh lebih besar dibandingkan dengan komposisi dana

perimbangan, seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara beberapa Provinsi lainnya memiliki komposisi dana perimbangan lebih besar dibandingkan dengan komposisi PAD, seperti Provinsi Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat.

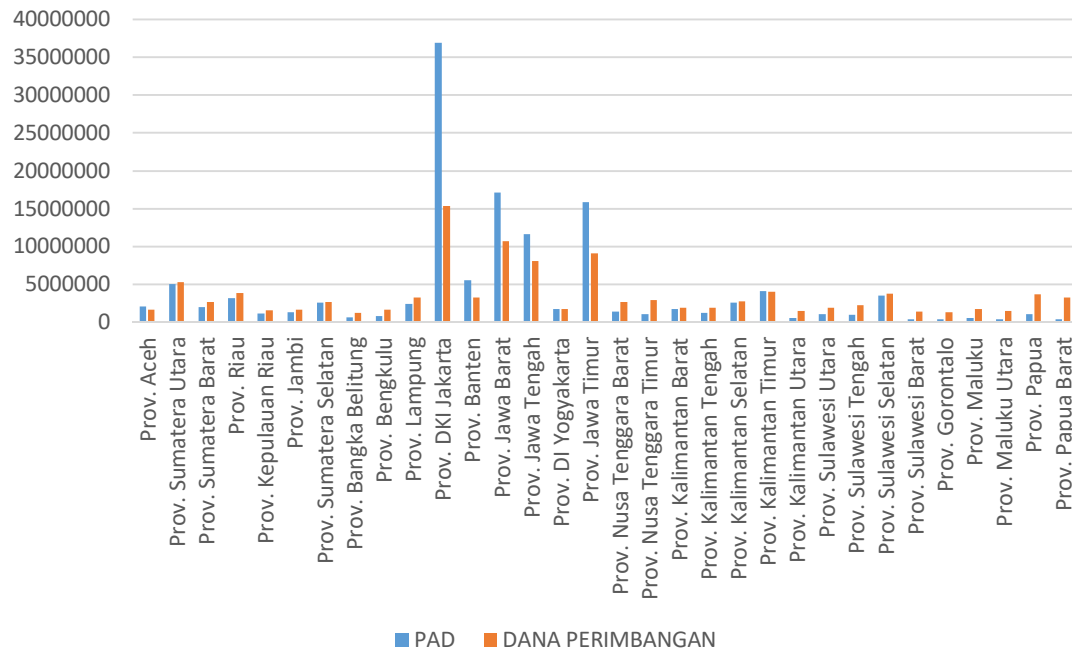


Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2015

Gambar 4.2.
Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan data dari gambar 4.2. dapat dilihat bahwa ada beberapa Provinsi yang mengalami penurunan dana perimbangan dan peningkatan jumlah PAD yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu masih ada beberapa Provinsi yang komposisi dana

perimbangannya lebih besar dibandingkan dengan komposisi PAD nya.



Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2016

Gambar 4.3.
Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan Provinsi di Indonesia Tahun 2016

Berdasarkan gambar 4.3. yaitu perbandingan jumlah PAD dan dana perimbangan tahun 2016, serta perbandingan di dua gambar sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2014, dapat dilihat bahwa komposisi PAD dan dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah selalu fluktuatif di setiap Provinsi selama 3 tahun terakhir. Ada beberapa provinsi yang memiliki jumlah PAD lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan, sebaliknya di beberapa provinsi lainnya jumlah dana perimbangan lebih besar dibanding jumlah PAD. Sehingga peneliti belum dapat menyimpulkan apakah terjadi *flypaper effect* pada Provinsi di

Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan pengujian menggunakan data semua variabel agar dapat diketahui terjadi atau tidaknya *flypaper effect*.

Penelitian terhadap 32 Provinsi di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut menghasilkan 96 data yang dapat diolah, dalam proses pengolahan data terdapat 17 data provinsi yang mengalami *outlier* sehingga data yang dapat diolah adalah sebanyak 79 data provinsi. Peneliti melakukan logaritma data pada variabel DAU, DAK, DBH, PAD, dan belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan data lima variabel tersebut memiliki rentang nilai yang sangat jauh terhadap data PDRB.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif yang disajikan dalam penelitian ini adalah mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan *standard deviation* untuk setiap variabel penelitian. Variabel yang dimaksud adalah variabel independen yang meliputi DAU, DAK, DBH, PAD (dalam jutaan rupiah) dan PDRB serta variabel dependennya yaitu belanja daerah (BD). Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	79	20568.00	1866548.00	1042815.3418	346210.36682
DAK	79	1038.00	7596342.00	542547.0633	1261587.93907
DBH	79	20767.00	4194971.00	555585.7215	785830.74243
PAD	79	11834.00	17042895.00	2688954.4304	3616014.63786
PDRB	79	-10.15	12.52	4.9881	3.57085
BD	79	642365.00	27621964.00	4953792.3038	4701976.06384
Valid N (listwise)	79				

Sumber: Output SPSS 16, 2018

Tabel 4.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif masing-masing variabel yang diuji. Berdasarkan tabel tersebut jumlah data dari setiap variabel yang diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 79 data sampel Provinsi. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai *minimum* variabel DAU (Dana Alokasi Umum) adalah 20.568 jutaan rupiah. Sementara itu nilai *maximum* variabel DAU adalah 1.866.548 jutaan rupiah dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1.042.815,3418 juta rupiah dan nilai *standard deviation* sebesar 346.210,36682 juta rupiah.

Variabel DAK (Dana Alokasi Khusus) mempunyai nilai *minimum* sebesar 1.038 juta rupiah. Sementara nilai *maximum* variabel DAK adalah sebesar 7.596.342 juta rupiah dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 542.547,0633 juta rupiah dan nilai *standard deviation* sebesar 1.261.587,93907 juta rupiah. Variabel DBH (Dana Bagi Hasil) memiliki nilai

mimum sebesar 20.767 juta rupiah dengan nilai *maximum* sebesar 4.194.971 juta rupiah. Sementara nilai rata-ratanya (*mean*) 555.585,7215 juta rupiah dan *standard deviation* sebesar 785.830,74243 juta rupiah.

Variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai *minimum* sebesar 11.834 juta rupiah dengan nilai *maximum* sebesar 17.042.895 juta rupiah. Sementara itu nilai rata-ratanya (*mean*) adalah sebesar 2.688.954,4304 juta rupiah dengan nilai *standard deviation* sebesar 3.616.014,63786 juta rupiah. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memiliki nilai *minimum* sebesar -10,15, dengan nilai *maximum* nya adalah sebesar 12,52. Sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 4,9881 dan nilai *standard deviation* adalah sebesar 3,57085. variabel BD (Belanja Daerah) memiliki nilai *minimum* sebesar 642.365 juta rupiah dengan nilai *maximum* nya adalah sebesar 27.621.964 juta rupiah. Sedangkan *mean* (nilai rata-rata) adalah sebesar 4.953.792,3038 juta rupiah dengan nilai *standard deviation* sebesar 4.701.976,06384 juta rupiah.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi:

a. Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk uji normalitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan diambil dari populasi yang normal dan berdistribusi secara normal (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Data dapat dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig(2-tailed) > alpha* (0,05). Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17447396
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.731
Asymp. Sig. (2-tailed)		.658

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah $0,658 >$ alpha ($0,05$) yang berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal dan model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi berganda terdapat hubungan linear diantara variabel bebasnya (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $>$ $0,1$ serta $VIF < 10$, maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil pengujian multikolinearitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.064	.503		14.036	.000		
	DAU_LN	-.038	.040	-.035	-.938	.352	.578	1.730
	DAK_LN	.096	.015	.209	6.525	.000	.803	1.246
	DBH_LN	.058	.020	.106	2.891	.005	.613	1.630
	PAD_LN	.486	.023	.822	20.715	.000	.523	1.912
	PDRB	-.030	.007	-.149	-4.348	.000	.703	1.422

1. Dependent Variable: Belanja Daerah (BD_LN)

Sumber : Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 variabel DAU memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,578 > 0,1$ serta nilai VIF sebesar $1,730 < 10$. Variabel DAK memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,803 > 0,1$ serta nilai VIF sebesar $1,246 < 10$. Variabel DBH memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,613 > 0,1$ serta nilai VIF sebesar $1,630 < 10$. Variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,523 > 0,1$ serta nilai VIF sebesar $1,912 < 10$. Variabel PDRB memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,703 > 0,1$ serta nilai VIF sebesar $1,422 < 10$. Diketahui bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Tujuan dilakukannya uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah terjadi korelasi antara residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dimana model regresi dapat dikatakan bebas autokorelasi apabila nilai dw terletak diantara -2 sampai $+2$ (Santoso, 2012). Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.940	.936	18035	1.919

a. Predictors: (Constant), PDRB, PAD_LN, DAK_LN, DBH_LN, DAU_LN

b. Dependent Variable: BD_LN

Sumber: Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1.919, yang berarti nilainya terletak diantara -2 sampai +2, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data regresi dalam penelitian ini.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual data untuk semua pengamatan dalam model regresi berganda (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *glejser*.

Suatu model regresi dapat dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.031	.300		-.104	.917
	DAU_LN	-.002	.024	-.013	-.085	.932
	DAK_LN	.004	.009	.061	.480	.632
	DBH_LN	.021	.012	.251	1.724	.089
	PAD_LN	-.008	.014	-.088	-.556	.580
	PDRB	.000	.004	.009	.064	.949

a. Dependent Variable: Abs_Res5

Sumber: Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 nilai signifikansi seluruh variabel independen > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

B. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto) terhadap variabel dependen (belanja daerah). Hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression*) disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.064	.503		14.036	.000
DAU_LN	-.038	.040	-.035	-.938	.352
DAK_LN	.096	.015	.209	6.525	.000
DBH_LN	.058	.020	.106	2.891	.005
PAD_LN	.486	.023	.822	20.715	.000
PDRB	-.030	.007	-.149	-4.348	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah
(BD_LN)

Sumber: Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$BD = 7,064 - 0,038X_1 + 0,096 X_2 + 0,058 X_3 + 0,486 X_4 - 0,030 X_5 + e$$

Keterangan:

X_1 = Dana Alokasi Umum

X_2 = Dana Alokasi Khusus

X_3 = Dana Bagi Hasil

X_4 = Pendapatan Asli Daerah

X_5 = Produk Domestik Regional Bruto

BD = Belanja Daerah

e = error

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diatas, nilai konstanta sebesar 7.064 menjelaskan bahwa nilai variabel belanja daerah adalah Rp 7.064.000.000 dengan asumsi jika tidak ada nilai dari variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto.

Koefisien regresi dana alokasi umum memiliki nilai sebesar 0,038 dan bertanda negatif, hal tersebut dapat diartikan bahwa antara dana alokasi umum dan belanja daerah berbanding terbalik. Setiap peningkatan dana alokasi umum sebesar Rp 1 akan mengakibatkan belanja daerah mengalami penurunan nilai sebesar Rp 38.000.

Koefisien regresi dana alokasi khusus memiliki nilai sebesar 0,096 dan bertanda positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa antara belanja daerah dan dana alokasi khusus berbanding lurus. Apabila terjadi peningkatan dana alokasi

khusus sebesar Rp 1 akan mengakibatkan kenaikan pada belanja daerah sebesar Rp 96.000

Koefisien regresi dana bagi hasil memiliki nilai sebesar 0,058 dan bertanda positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa antara dana bagi hasil dan belanja daerah berbanding lurus. Setiap peningkatan dana bagi hasil sebesar Rp 1, akan mengakibatkan kenaikan terhadap belanja daerah sebesar Rp 58.000.

Koefisien regresi pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 0,486 dan bertanda positif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah berbanding lurus. Setiap terjadi peningkatan terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp 1, akan mengakibatkan peningkatan terhadap belanja daerah sebesar Rp 48.600.

Koefisien regresi produk domestik regional bruto memiliki nilai sebesar 0,030 dan bertanda negatif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa antara produk domestik regional bruto dan belanja daerah berbanding terbalik. Setiap peningkatan produk domestik regional bruto sebesar 1 kesatuan akan mengakibatkan penurunan nilai terhadap belanja daerah sebesar Rp 30.000.

2. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara parial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 5% atau 0,05. Adapun kriteria suatu hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$ serta koefisien regresi bernilai positif, maka hipotesis diterima dan koefisien regresi signifikan.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ serta koefisien regresi bernilai negatif, maka hipotesis ditolak dan koefisien regresi tidak signifikan

Hasil uji t dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 4.8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.064	.503		14.036	.000		
	DAU_LN	-.038	.040	-.035	-.938	.352	.578	1.730
	DAK_LN	.096	.015	.209	6.525	.000	.803	1.246
	DBH_LN	.058	.020	.106	2.891	.005	.613	1.630
	PAD_LN	.486	.023	.822	20.715	.000	.523	1.912
	PDRB	-.030	.007	-.149	-4.348	.000	.703	1.422

a. Dependent Variable: BD_LN

Sumber: Output SPS 16, 2018

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa:

a. Uji Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,938 dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,038 dan nilai sig variabel dana alokasi umum adalah $0,352 < \alpha (0,05)$, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) **ditolak**. Hal tersebut berarti dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia.

b. Uji Hipotesis Kedua (H_2)

Uji hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6,525 dengan nilai koefisien regrasi positif sebesar 0,096 dan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini **diterima**. Hal tersebut berarti dana alokasi khusus

(DAK) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia.

c. Uji Hipotesis Ketiga (H_3)

Uji hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,891 dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,058 dan nilai sig sebesar $0,005 < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H_3) **diterima**. Hal tersebut berarti dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia.

d. Uji Hipotesis Keempat (H_4)

Uji hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 20,715 dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,486 dan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini **diterima**. Hal tersebut berarti pendapatan asli

daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia.

e. Uji Hipotesis Kelima (H_5)

Uji hipotesis kelima (H_5) dalam penelitian ini menyatakan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $-4,348$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-0,030$ dan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis **ditolak**, yang berarti bahwa produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia.

3. Uji F

Uji F memiliki tujuan untuk membuktikan apakah keseluruhan variabel independen yang terdapat dalam model regresi secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Semua variabel independen dapat dikatakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< \alpha (0,05)$ (Nurdini.,dkk, 2015). Hasil Uji F disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9.
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	37.138	5	7.428	228.359	.000 ^a
	Residual	2.374	73	.033		
	Total	39.513	78			

Sumber: Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 nilai F_{hitung} 228,359 > F_{tabel} 2,34 dan nilai sig 0,000 < α (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa DAU, DAK, DBH, dan PDRB secara serentak berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.10.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.940	.936	.18035

1. Predictors: (Constant), PDRB, PAD_LN, DAK_LN, DBH_LN, DAU_LN

2. Dependent Variable: Belanja Daerah (BD_LN)

Sumber: Output SPSS 16, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 nilai adjusted R^2 adalah sebesar 0,936 yang berarti bahwa 93,6% variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh 5 variabel

independen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara itu sisanya ($100\% - 93,6\% = 6,4\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji koefisien determinasi juga digunakan untuk menguji hipotesis keenam (H_6) terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada provinsi di Indonesia. Menurut Nurdini.,dkk, (2014) pengujian *flypaper effect* dilakukan dengan cara membandingkan nilai *adjusted R Square* variabel DAU, DAK, dan DBH dengan nilai nilai *adjusted R Square* variabel PAD. Jika nilai *adjusted R Square* variabel DAU, DAK, dan DBH lebih besar, maka hipotesis keenam (H_6) diterima. Hasil perbandingan antara uji koefisien determinasi (DAU, DAK, dan DBH) dengan PAD terhadap belanja daerah disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.11.
Perbandingan hasil uji koefisien determinasi
(DAU, DAK, dan DBH) dengan PAD terhadap belanja daerah

Model Summary^b	
Variabel	Adjusted R Square
DAU	.497
DAK	
DBH	
PAD	.898

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 nilai *adjusted R Square* (DAU, DAK, dan DBH) secara simutlan terhadap belanja daerah sebesar 0,497 yang memiliki arti bahwa

DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 49,7%. Sementara itu, nilai *adjusted R Square* PAD terhadap belanja daerah adalah sebesar 0,898 yang memiliki arti bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 89,8%.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, pengaruh simultan DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah lebih kecil dibanding pengaruh PAD terhadap belanja daerah ($0,497 < 0,898$). Sehingga hipotesis keenam (H_6) **ditolak**, dan menyatakan bahwa **tidak terjadi fenomena *flypaper effect*** pada provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka disajikan ringkasan hasil hipotesis penelitian yang telah diuji pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12.
Hasil Ringkasan Hipotesis Penelitian

Ket	Hipotesis	Hasil Penelitian	Hasil Nilai Sig
H ₁	DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	Ditolak dengan nilai sig sebesar $0,352 > \alpha (0,05)$, dan koefisien regresi bertanda negatif.
H ₂	DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	Diterima dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$, dan koefisien regresi bertanda positif.
H ₃	DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	Diterima dengan nilai sig sebesar $0,005 < \alpha (0,00)$, dan koefisien regresi bertanda positif
H ₄	PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	Diterima dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$, dan koefisien regresi bertanda positif
H ₅	PDRB berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia	Ditolak dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$, dan koefisien regresi bertanda negatif
H ₆	Apakah terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada provinsi di Indonesia	Tidak terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada provinsi di Indonesia	Ditolak dengan nilai <i>adj.R Square</i> DAU,DAK,DBH ($0,497 < \text{nilai } adj. R Square$ PAD ($0,898$))

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

C. Pembahasan (Interprestasi)

1. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dengan nilai sig $0,352 > \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi bertanda negatif. Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi. Akan tetapi menurut Iskandar (2012) adanya DAU memberikan dampak yang tidak baik terkait aliran transfer, karena pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan menggunakan dana asli daerahnya untuk membiayai kebutuhan belanja. Sementara hal ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang mengharapkan kemandirian dari setiap daerah dengan tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Halim (2007) menyatakan untuk meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat berkurang agar tercapainya daerah mandiri sesuai tujuan desentralisasi, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar dan dana perimbangan (DAU) hanyalah menjadi pendukung.

DAU yang dialokasikan ke daerah berasal dari 26% pendapatan dalam negeri neto yang dicantumkan di APBN setiap tahunnya, dimana pemerintah provinsi memperoleh 10% dari total DAU dan 90% dialokasikan ke

kabupaten/kota. Sehingga wajar bila DAU bukan menjadi sumber pendanaan terbesar pemerintah daerah provinsi dalam hal membiayai kebutuhan belanjanya. Bahkan kontribusi DAU terhadap belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur kurang dari 2% selama tahun 2014-2016. Oleh sebab itu dalam hal membiayai kebutuhannya Pemerintah provinsi semakin mengoptimalkan potensi kekayaan sumber daya alam daerahnya seperti perkebunan, pertanian, tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah. Dengan demikian semakin banyak Provinsi di Indonesia yang sudah dapat dikatakan menjadi daerah yang mandiri dari segi keuangan dengan tidak bergantung pada DAU.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilo dan Adi (2007) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi daerah studi empiris pada Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa adanya DAU tidak membuat kemandirian di suatu daerah menjadi lebih baik. Sebaliknya adanya DAU semakin membuat ketergantungan daerah terhadap pusat bertambah. Sehingga semakin besar DAU yang digunakan oleh suatu daerah maka daerah tersebut semakin tidak mandiri.

Penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Shiddieqy dan Afriana (2013) dengan judul *Flypaper Effect*

pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada kota dan kabupaten di Kalimantan, yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan Pulau Kalimantan terkenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti tambang minyak, tambang batu bara, kelapa sawit, serta kekayaan alam lainnya. Sehingga pemerintah daerah di Kalimantan lebih cenderung mengandalkan PAD daripada DAU dalam hal membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Nur (2015) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh DAU pada kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa dikarenakan terjadi peningkatan pada pengeluaran belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, dikarenakan adanya kebijakan penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diiringi dengan penambahan jumlah gaji PNS. Sementara menurut UU Nomor 33 tahun 2004, alokasi DAU tidak lagi dikaitkan secara langsung dengan belanja pegawai daerah. Sehingga DAU tidak mempengaruhi peningkatan belanja daerah yang disebabkan oleh belanja pegawai. Penelitian Sriwahyuni (2010) dan Setyorini (2013) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada masing-masing daerah yang diteliti.

2. Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada Provinsi di Indonesia dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dan koefisien regresi bertanda positif. Dana Alokasi Khusus menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Alokasi Khusus hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas nasional, diselenggarakan oleh daerah dan sudah ditetapkan dalam laporan APBN tahun bersangkutan. Adapun kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, seperti belanja untuk pelayanan publik serta pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga nantinya para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut karena sarana dan prasarana telah memadai. Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya, maka dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya, sehingga peluang daerah tersebut untuk lebih berkembang akan semakin besar.

Diterimanya hipotesis kedua mencerminkan bahwa pemerintah provinsi telah menggunakan dengan baik Dana Alokasi Khusus yang telah disalurkan dan mencapai tujuan dari pengalokasian DAK itu sendiri. Seperti penggunaan DAK untuk penyelenggaraan air minum dan sanitasi di wilayah timur pada

tahun 2014 yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Sehingga alokasi DAK pada tahun tersebut untuk wilayah timur cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khoiri dan Hasan (2015) dengan judul “*Flypaper Effect* dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat” menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian tersebut memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena prioritas DAK adalah belanja langsung yang merupakan bagian dari belanja daerah, seperti belanja yang bertujuan untuk menyejahterahkan rakyatnya dalam hal menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana publik. Sehingga wajar apabila DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Demikian halnya penelitian Liando (2017) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Jawa Timur yang menyatakan jika DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut dikarenakan DAK bertujuan untuk membiayai program-program nasional di daerah, sehingga setiap daerah berhak menggunakan dana ini sesuai dengan porsi yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk pembangunan dan peningkatan daerah.

Didukung oleh penelitian Amalia.,dkk, (2015) dengan studi empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa DAK diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja daerah yang bersifat lebih spesifik. Rosminar.,dkk (2017) di Aceh menyatakan peningkatan

jumlah DAK akan meningkatkan belanja daerah. Penelitian lainnya yang sejalan yaitu Sasana (2011) dan Yulina.,dkk (2017) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara DAK terhadap belanja daerah pada masing-masing wilayah yang diteliti.

3. Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia dengan nilai sig sebesar $0,005 < \alpha (0,05)$, dan koefisien regresi bertanda positif. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari pendapatan APBN dan pengalokasiannya berbeda dengan DAU dan DAK, yaitu didasarkan pada angka persentase bagi hasil sesuai dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang sumbernya berasal dari pajak dan sumber daya alam masing-masing daerah di Indonesia.

Oleh sebab itu, besarnya alokasi DBH didasarkan pada keberhasilan suatu daerah dalam penghasilan pajak dan sumber daya alam daerahnya masing-masing. Apabila suatu daerah mendapat penghasilan pajak daerah dan hasil pengelolaan sumber daya alam yang besar, maka penerimaan alokasi DBH juga akan besar. Begitu pula sebaliknya apabila penghasilan pajak daerah dan hasil pengelolaan sumber daya alam kecil, maka DBH yang diterima juga kecil.

DBH bersifat *block grant* yang artinya dapat digunakan secara mandiri tanpa ada aturan penggunaan. Hasil dari penerimaan DBH dapat digunakan

untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masing-masing daerah. Pembangunan serta pengeluaran lain yang ada hubungannya dengan pengelolaan kekayaan daerah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya belanja daerah. Sehingga wajar jika semakin besar DBH yang diterima, pemerintah daerah cenderung melakukan pengeluaran belanja daerah yang juga semakin besar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyati dan Yusriadi (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. DBH dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Dana bagi hasil memiliki peran dalam meningkatkan belanja daerah. Daerah yang mendapatkan DBH besar, cenderung memiliki jumlah belanja daerah yang besar pula. Indikasi dari hasil penelitian ini adalah perilaku belanja daerah akan dipengaruhi cukup besar oleh adanya sumber penerimaan DBH.

Penelitian Nurdini.,dkk (2014) mengenai Fenomena *Flypaper Effect* pada DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai sig $0,00 < 0,05$ dan berarah positif. Dimana setiap terjadi kenaikan DBH sebesar Rp 1.000.000 akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp 1.117.000.000.000. Sejalan dengan penelitian Sukartono (2010) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap

belanja daerah dan diterima signifikan. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2010), Basri dan Riswandi (2014), Inayati dan Setiawan (2017), dan Iskandar (2012).

4. Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada provinsi di Indonesia dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dan bertanda positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan peningkatan perekonomian daerah sehingga dapat menyejahterahkan masyarakatnya yang merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi.

Diterapkannya desentralisasi di Indonesia menuntut setiap pemerintah daerah untuk menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada Pemerintah Pusat. Menurut Halim (2007) untuk meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat, maka Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar dalam hal membiayai kebutuhan belanja daerah. Oleh sebab itu, semakin besar anggaran belanja daerah, semakin besar pula PAD yang harus dimiliki oleh daerah tersebut.

Peningkatan jumlah PAD pada Provinsi di Indonesia setiap tahunnya menggambarkan mengenai kinerja daerah yang juga meningkat setiap tahunnya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk dijadikan PAD. Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah, sehingga apabila terjadi peningkatan PAD maka kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga meningkat. Hal ini dapat diamati dari Provinsi DKI Jakarta yang selama tahun 2014-2016 berhasil menghasilkan PAD lebih dari 30 triliun rupiah dimana pajak daerah berkontribusi lebih dari 80%. Selanjutnya tugas pemerintah daerah adalah memperbaiki fasilitas publik maupun kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.

Hasil penelitian ini konsisten dan sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dikemukakan oleh Maimunah dan Akbar (2008) tentang *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (terutama pajak) akan memberi pengaruh terhadap pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah, atau yang lebih dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*.

Hasil penelitian Nurdini.,dkk (2014) dengan judul analisis *flypaper effect* pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah

dengan belanja daerah di Jawa Barat. Sebagai sumber penerimaan daerah, PAD perlu ditingkatkan sehingga dapat menanggung sebagian beban belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas pembangunan, dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga dapat mewujudkan kemandirian otonomi daerah yang nyata, luas serta bertanggungjawab. Oleh sebab itu, semakin besar pemerintah daerah menganggarkan belanja daerah dalam APBD, semakin besar pula usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Iskandar (2012) yang berjudul *Flypaper Effect* pada *Unconditional Grants* dengan studi empiris pada kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara PAD terhadap belanja daerah. Kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi daerahnya untuk PAD sangat berkaitan dengan kemandirian dalam APBD. Pemerintah daerah menargetkan PAD berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dan realisasi PAD tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, semakin besar realisasi pendapatan dari PAD, maka semakin besar jumlah dana yang dapat disalurkan oleh pemerintah daerah melalui alokasi anggaran belanja daerah untuk tahun selanjutnya.

Penelitian mendukung lainnya adalah Jolianis (2014) dengan judul pengaruh dana aloksi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat. Hasil penelitiannya membuktikan terdapat hubungan positif antara PAD terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat sudah mampu mennggali dan mengelola dengan baik potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga dapat menjadi sumber keuangan berupa pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Penelitian konsisten lainnya ialah Kusumadewi dan Rahman (2007), Sasana (2010), Afrizawati (2012), Khoiri dan Hasan (2015), masing-masing penelitian menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

5. Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada Provinsi di Indonesia dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dan koefisien regresi bertanda negatif. Berdasarkan data PDRB pada penelitian ini (laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran konsumsi pemerintah) ternyata pertumbuhan ekonomi periode t-1 tidak dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah untuk periode t. Hal ini bukan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh PDRB tidak menjadi acuan dalam proses penyusunan anggaran belanja dalam APBD. Karena menurut Tuasikal (2008) terdapat faktor-faktor tertentu lain yang dapat mempengaruhi anggaran belanja seperti proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disetiap daerah yang

selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerahnya juga memperhatikan kondisi politik dan sosial di daerahnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Dewi dan Suyanto (2015) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui PDRB tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat tercipta dari infrastruktur atau sarana dan prasarana yang baik, dimana sarana dan prasarana maupun infrastruktur berasal dari belanja modal. Sementara dalam penelitian ini, pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modalnya tepat sasaran.

Penelitian ini sejalan dengan Tuasikal (2008) dengan judul Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerinah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa PDRB tidak mempunyai kontribusi positif terhadap belanja modal dengan nilai koefisien (-0,30). Demikian halnya dengan penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,009 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,114 > \alpha (0,05)$, hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak

mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustika (2007), dan Adiwiyana (2011).

6. *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah

Hipotesis keenam menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada Provinsi di Indonesia dengan nilai *adjusted R Square* dana perimbangan (DAN, DAK, dan DBH) lebih kecil dibanding nilai *adjusted R Square* PAD. *Flypaper effect* adalah suatu keadaan dimana pengaruh yang diberikan oleh dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas desentralisasi dan prinsip otonomi yang menuntut kemandirian pemerintah daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Afrizawati (2012) menyatakan secara implisit timbul beberapa implikasi dari adanya *flypaper effect* pada belanja daerah, diantaranya: (1) Celah fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan kerangka kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada daerah akan tetap ada. Jika terjadi *flypaper effect* pada suatu daerah berarti pencapaian pemberian dana transfer selama ini belum optimal, (2) Adanya ketidakmaksimalan pemanfaatan sumber-sumber penghasil PAD, (3) Pemerintah daerah akan terus bergantung kepada pemerintah pusat, karena dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah subsidi terhadap pengeluaran daerah untuk membantu mengurangi

beban belanjanya, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri akan melemah (4) Terdapat respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer (5) Mengakibatkan daerah tersebut berkurang kemampuan kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 32 Provinsi yang ada di Indonesia, ditemukan fakta bahwa tidak terjadi *flypaper effect* yang mencerminkan bahwa selama tahun 2014-2016 secara umum provinsi di Indonesia telah mandiri dari segi keuangannya karena sudah mampu bertumpu pada keuangan daerahnya sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, dikarenakan pemerintah provinsi pada tahun 2014-2016 telah mampu mengoptimalkan PAD yang kemudian dijadikan sumber utama dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya sesuai dengan gambar 4.1. sampai 4.3. diatas.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kang dan Setyawan (2012) dengan judul *Intergovernmental Transfer and The Flypaper Effect–Evidence From Municipalities/Regencies In Indonesia*. Hasil koefisien PAD sebesar (3,98) > koefisien dana transfer (0,87) yang artinya pengaruh PAD lebih kuat jika dibandingkan dengan pengaruh dana transfer. Sehingga penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat *flypaper effect* pada respon pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017) pada kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menyatakan bahwa selama

tahun 2012-2015 tidak terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah. Penelitian lainnya yang sejalan adalah penelitian yang dilakukan oleh Khoiri dan Hasan (2015) dengan judul *Flypaper Effect dan Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat* menyatakan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan rata-rata PAD kabupaten dan kota di Jawa Barat memang cukup besar, bahkan beberapa ada yang termasuk kedalam kategori kabupaten/kota yang memiliki PAD tertinggi di Indonesia menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk). Demikian halnya dengan penelitian Amalia (2015) dan Mentayani.,dkk (2012), yang menyatakan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah.